

PERANAN ISLAM DALAM PROSES POLITIK DI INDONESIA

Oleh Nurcholish Madjid

Sungguh tidak mudah berbicara tentang Islam di Indonesia, sebab agama termasuk masalah peka. Kosa-kosa politik Indonesia telah diperkaya dengan singkatan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) yang melukiskan kepekaan politik di Indonesia. Sekalipun demikian masih boleh dikatakan bahwa masih ada ruang bagi pembahasan tentang masalah-masalah keagamaan, sejauh tidak mengganggu ketenangan stabilitas politik — sesuatu yang didambakan sedemikian rupa oleh mereka yang memandang perlunya pembangunan — yaitu pembahasan yang tidak memihak dan ilmiah.

Pada 1970-an, Indonesia melewati suatu keadaan yang penting — yang belum banyak dibahas — dalam sejarahnya sebagai bangsa merdeka. Yaitu dasa warsa di mana Indonesia menyaksikan, untuk pertama kalinya, munculnya sejumlah besar lulusan universitas. Yang relevan dengan pembicaraan kita ialah kenyataan bahwa sebagian besar lulusan berlatar belakang kultur Islam. Tentu saja, mengatakan begini membawa beberapa masalah. Jika, sebagaimana sering dinyatakan oleh pemimpin-pemimpin Islam, mayoritas rakyat Indonesia memeluk Islam, maka mengatakan bahwa sebagian besar lulusan universitas itu Muslim adalah berlebihan. Namun, kenyataannya ialah bahwa hal itu ada benarnya juga, sebab para pengamat melihat adanya perbedaan antara Muslim “sejati” dan Muslim “nominal”. Dengan demikian, mengatakan bahwa

sebagian besar lulusan itu adalah Muslim berarti mengatakan bahwa mereka adalah Muslim “sejati”, apa pun kiranya makna istilah “sejati” tersebut.¹

Dampak Pendidikan Kolonial

Penggunaan istilah “intelektual”, celakanya, menimbulkan masalah. Di sini istilah itu digunakan, secara agak bebas, untuk menunjuk ke kelas berpendidikan “modern” (Barat), tanpa bermaksud mengatakan bahwa mereka yang terdidik dalam sistem “tradisional” (Islam) bukanlah intelektual. Ada banyak implikasi dari munculnya intelektual “modern” Muslim. Arti gejala ini bisa lebih dinilai jika kita proyeksikan pada sejarah panjang Islam Indonesia di bawah pemerintahan kolonial (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*, atau Perusahaan India Timur). Sejarah kolonial bermula dengan

¹ Hal ini, tentu saja, merujuk kepada identifikasi Muslim Indonesia sebagai “Santri” dan “Abangan” yang lazim dilakukan oleh ahli antropologi yang mengikuti contoh Clifford Geertz dalam bukunya yang terkenal, *Religion of Java* (Chicago: The University of Chicago Press, Edisi Phoenix, 1976). Memang, pandangan Geertz tentang “Muslim sejati” (Santri) tidak semuanya bebas dari kritik. Mengenai keberatan terhadap penafsiran Geertz atas datanya, lihat Marshall G.S. Hodgson, *The Venture of Islam*, 3 jilid (Chicago: The University of Chicago Press, 1974), jilid 2, h. 551 catatan kaki 2. Di situ Hodgson mengatakan bahwa “Geertz mengidentifikasi Islam hanya dengan yang dibenarkan oleh mazhab modernis, dan menisbatkan segala yang lain pada latar belakang asli atau Hindu Budha, yang secara tidak beralasan mencap banyak kehidupan keagamaan Muslim di Jawa sebagai ‘Hindu’. Ia mencirikan serangkaian panjang gejala, yang pada hakikatnya universal bagi Islam dan kadangkala terdapat bahkan dalam al-Qur’an itu sendiri, sebagai tidak Islami; dan karena itu, penafsirannya atas masa lalu Islami dan beberapa reaksi yang anti-Islam sangat menyesatkan... Bagi orang yang mengetahui Islam, data lengkapnya — terlepas dari niatnya — menunjukkan betapa sangat kecil sisa masa lalu Hindu, bahkan di Jawa pedalaman, dan menimbulkan pertanyaan, kenapa kemenangan Islam demikian sempurna”. Namun, tampaknya identifikasi itu masih juga ada manfaatnya — meski terbatas — dan, dengan demikian, diterapkan di sini.

berkuasanya VOC yang hampir tidak memperhatikan masalah pendidikan, dan sedikit kesempatan pendidikan yang diberikannya terbuka hanya bagi orang-orang Kristen Eropa maupun pribumi. “Bukti pertama diperhatikannya pendidikan untuk orang-orang Muslim terdapat dalam suatu intruksi Gubernur Jenderal Deandels pada 1808”, namun, “Tidak ada bukti tentang dilaksanakannya instruksi itu... Undang-undang Pemerintah Hindia Belanda 1808 menandai suatu perubahan resmi sikap”. Namun, rencana-rencana yang didasarkan pada Undang-undang itu “tidak pernah terwujud, sejauh menyangkut pendidikan pribumi”.²

Perubahan nyata baru terjadi pada zaman “Kebijaksanaan Etis” pada 1901. Inilah kebijakan kolonial yang “bersumber terutama dari segi manusiawi, yang menyatakan bahwa Belanda berutang budi pada Indonesia atas keuntungan-keuntungan masa lalu yang telah diperolehnya dari Indonesia”. Kebijakan Etis itu, pada hakikatnya, merupakan “suatu program kesejahteraan yang berupaya memacu dan mengarahkan kemajuan ekonomi, politik, dan sosial”. Yang berkaitan dengan pembicaraan kita ialah perhatian besar yang diberikan kepada pendidikan gaya Barat, dan hal itu menyebabkan semakin banyak orang Indonesia memasuki sekolah umum. Namun, dibandingkan dengan jumlah keseluruhan penduduk Indonesia, jumlah itu masih kecil sekali. Bahkan, yang lebih kecil ialah jumlah pelajar dari kalangan Muslim santri. Hal ini sebagian disebabkan oleh sistem diskriminatif pendidikan, dan sebagian disebabkan oleh politik non-koperatif para ulama terhadap pemerintah kolonial.³

² Amry Vandenbosch, *The Dutch East Indies* (Berkeley: University of California Press, 1942), h. 198-199.

³ Robert Van Niel, dalam Ruth Mc Vey, ed., *Indonesia* (New Haven: Southeast Asia Studies, Yale University, 1963), h. 291. Yang lebih memperburuk situasi, sistem pendidikan kolonial sangat diskriminatif terhadap kaum Muslim (santri). Ia di organisasi dengan konsep stratifikasi sosial Belanda atas pendudukan Indonesia. Di puncak piramid adalah orang-orang Eropa, disusul oleh kaum ningrat pribumi (priyayi), dan kemudian oleh “orang-orang Timur asing” yang terdiri terutama atas orang Cina. Pada dasar piramid adalah rakyat

Dengan demikian, akibat puncak pendidikan kolonial ialah melebarnya jurang antara rakyat yang berorientasi Islam dan elit tradisional, priyayi, yang kebanyakan terdiri atas orang-orang Indonesia berpendidikan Barat. “Interposisi elit tradisional dan Cina cenderung menyamarkan peranan Belanda sebagai pengisap tenaga pribumi”. Inilah sebabnya, sejak permulaannya, “gerakan nasionalis di Indonesia bercorak anti-kolonial, anti-Cina, keislaman, dan sosialis”.⁴ Islam segera menjadi senjata ideologis dari berbagai gerakan melawan para penjajah “kafir”, dan gerakan keislaman untuk membantu dan memajukan kepentingan para santri — sebagaimana yang terjadi pada SDI (Sarikat Dagang Islam), 1905,

jelata, terutama terdiri atas orang Muslim. Karenanya, sekolah-sekolah dasar dilembagakan secara hierarkis, yang di puncaknya adalah sekolah-sekolah khusus untuk orang-orang Eropa (ELS — *Eropesche Lagere School* — *European Elementary School*), disusul oleh sekolah-sekolah kaum ningrat tradisional (HIS — *Holland’s Inlandse School*) — dan kemudian disusul oleh HCS (*Holland’s Chinese School*).

Semua sekolah itu menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, dan lulusannya diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat lebih tinggi seperti Mulo (setingkat SMP) yang dilanjutkan ke AMS (setingkat SMA). Di puncak sistem berada lembaga-lembaga studi lebih tinggi yang sangat berorientasi kerja. Yang terkenal di antaranya ialah sekolah teknik di Bandung (THS), sekolah kedokteran di Jakarta (STOVIA-GHS), sekolah hukum di Jakarta (RHS), dan sekolah kedokteran di Surabaya (NIAS).

Pada tingkat terendah sistem itu berada sekolah-sekolah desa, yang terbagi menjadi Sekolah Dasar (tiga tahun), dan Sekolah Menengah Pertama (lima tahun). Orang kebanyakan dan, karena itu, kebanyakan Muslim santri, memasuki sekolah-sekolah pribumi ini. Tidak seperti lulusan sekolah-sekolah Belanda tersebut di atas, lulusan sekolah-sekolah pribumi ini tidak bisa melanjutkan ke tingkat pendidikan lebih tinggi. Mereka dipandang sudah bisa mencukupi kebutuhan diri sendiri di wilayah-wilayah pedesaan dan dinas-dinas non-pemerintah lainnya. (Lihat Edwin R. Embree, *et. al.*, *Island India Goes to School* (Chicago: The University of Chicago Press, 1934, h. 41). Selanjutnya, menjelang akhir pemerintahan kolonial, Belanda, karena khawatir akan potensi “proletariat intelektual”, berupaya untuk tidak mendidik lebih dari yang bisa dilakukan. (Lihat Van Niel, *op. cit.*, h. 291-292).

⁴ John W. Henderson, *et. al.*, *Area Handbook for Indonesia* (Washington D.C.: American University, Foreign Area Studies, 1970), h. 44.

sebagai gerakan massa pertama yang besar dan diorganisasi secara politik — dengan mudah ditafsirkan sebagai nasionalisme yang kuat. Pertentangan antara nasionalisme keislaman dan keningratan tradisional ditegaskan oleh penentangan kuat terhadap gerakan itu yang dilancarkan oleh para pejabat pemerintah dari kalangan orang-orang ningrat Indonesia. Kaum priyayi merasa bahwa gerakan nasionalis Islam menyerang *privelese* mereka. Penentangan itu dilakukan untuk melestarikan diri.⁵

Perhatian yang kian besar dari pemerintah terhadap meningkatnya fundamentalisme Islam, dan tindakan intensif dari pihak berwenang Indonesia untuk menghentikan ekspresi Islam yang secara radikal, mengkritik pemerintah, telah muncul pada tahun-tahun belakangan ini. Isu-isu ini, tidaklah terlalu dramatis untuk dikatakan, kiranya bersifat sentral bagi kebangkitan politik Islam di Indonesia.

Pendidikan Modern Santri Indonesia: Menuju Islam Fundamentalis

Kembali kepada yang telah dikemukakan di atas, tahun-tahun ini, bermula dari dasa warsa yang lalu, telah menjadi momen di mana Muslim Santri Indonesia memiliki sejumlah besar intelektual berpendidikan modern. Akibat dari gejala ini ialah kian fasihnya kaum Muslim mengungkapkan aspirasi-aspirasi mereka. Sebagai efek sampingnya, pendidikan telah memperbesar kepercayaan diri. Pertentangan tersembunyi antara mereka yang berorientasi Islam dan birokrasi yang didominasi kaum priyayi kini muncul di permukaan dalam bentuk oposisi politik terhadap pemerintah. Keterlibatan, yang sudah lama didambakan, para politisi yang berorientasi Islam dalam kancah politik — suatu keinginan yang

⁵ George Mc Turman Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia* (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1970), h. 67-68.

senantiasa ditepis oleh elite penguasa — kini mendapati ekspresi pencapaiannya dalam suatu ideologi politik yang bahkan lebih berilham-Islam. Hal ini, bagi sebagian pengamat, adalah fungsi “fundamentalisme Islam”.⁶

Meski mengandung pengertian negatif, “fundamentalisme Islam” kiranya memiliki fungsi positif dalam keseluruhan proses sistem sosial. Dengan menggunakan karya Naqsyabandiyah selama masa-masa Moghul di India sebagai perbandingan, John Obert Voll berkata bahwa:

... Pola fundamentalis bertindak sebagai mekanisme pengaturan korektif. Dalam konteks perubahan dan adaptasi, fundamentalis berupaya menjaga agar pesan dasar tetap sepenuhnya berpengaruh atas umat. Jika pengaturan kondisi-kondisi lokal dan penggunaan gagasan-gagasan dan teknik-teknik baru mengancam unsur-unsur khas dan asli Islam, maka mulai terbentuklah tekanan-tekanan dari para fundamentalis. Dalam satu hal, misi fundamentalisme Islam ialah menjaga agar pengaturan perubahan tetap berada di dalam jelajah pilihan-pilihan yang jelas-jelas Islami.⁷

Namun, fundamentalisme merupakan salah satu dari dua sisi sebuah koin. Di satu pihak, fundamentalisme tersuntik negativisme. Inti ideologi fundamentalis adalah anti-Westernisme. Hal ini ironis, meski dapat diterangkan, sebab para pendukung fundamentalisme anti-Westernisme adalah orang-orang berpendidikan Barat. Di pihak lain, menurut Fazlur Rahman, pengetahuan fundamentalis Islam belakangan tentang Islam adalah dangkal. Ia mengatakan bahwa fundamentalisme, “pada dasarnya, merupakan fungsi orang bukan ahli, kebanyakan adalah para profesional — pengacara,

⁶ Istilah “Fundamentalisme Islam” di sini digunakan hanya secara tentatif. Untuk arti tepat istilah itu, lihat Karm Akhtar dan Ahmad Sakr, *Islamic Fundamentalism* (Cedar Rapids, Iowa: Igram Press Co., 1982).

⁷ John Obert Voll, *Islam, Continuity, and Change in the Modern World* (Boulder, Colorado: Westview Press, 1982), h. 31.

dokter, insinyur”.⁸ Fazlur Rahman melihat gejala ini sebagai bisa membahayakan, sebab dapat menimbulkan pemiskinan intelektual atas Islam modern. Ia menyatakan bahwa kaum Muslim harus lebih menghargai warisan intelektual tradisional mereka.

Sisi lain koin, segi lebih positif dari munculnya gejala intelektual yang berorientasi ke Islam, ialah meningkatnya kemampuan teknis Islam. Islam Indonesia tidak perlu lagi merasa malu bila diejek sebagai “mayoritas angka, namun minoritas teknikal”, — sebagaimana halnya dengan jangka waktu lama sebelum dasa warsa-dasa warsa ini — Islam Indonesia kini telah mempunyai kian banyaknya teknokrat. Para Muslim santri berpendidikan tinggi ini aktif dalam semua segi kehidupan nasional, termasuk pemerintahan. Memang, dalam kenyataannya, kebanyakan dari mereka, mengingat Indonesia merupakan sebuah negara sedang membangun, bekerja dalam birokrasi pemerintah.

Keterlibatan Santri dalam Birokrasi

Keterlibatan mereka dalam pemerintahan dan birokrasi tidak berarti bahwa mereka mencampakkan semua aspirasi politik yang lama mereka perjuangkan. Malah, sebagian dari mereka mulai melihat jalan-jalan baru untuk mewujudkan aspirasi-aspirasi mereka, dan sebagian dari mereka mendapatkan keuntungan dengan “bekerja dari dalam”. Pada permulaan keterlibatan mereka dalam birokrasi dan perusahaan lain pemerintah, dampak kehadiran mereka kecil, dan terasa hanya pada tingkat perseorangan. Tahun-tahun ini, setelah sekitar dua dasa warsa terlibat dan berpartisipasi aktif, dampaknya mulai terasa pada tingkat sistemis sebagai hasil kerja suatu

⁸ Fazlur Rahman, “Roots of Islamic Neo Fundamentalism”, dalam Philip H. Stoddard, *et. al.*, *Change and the Muslim World* (Syracuse, N.Y.: Syracuse University Press, 1981), h. 34. Lihat pula Fazlur Rahman, “Islam: Legacy and Contemporary Challenge”, dalam Cyriac K Pullapilly, *Islam in the Contemporary World* (Notre Dame, Indiana: Cross Roads Books, 1980), h. 415.

sistem. Semangat para teknokrat yang berorientasi ke Islam — yang kebetulan sebagian besar memiliki latar belakang pengalaman politik yang sama melalui organisasi-organisasi kemahasiswaan — yang kebanyakan berasal dari mulai bekerja sebagai kekuatan pengikat di kalangan mereka. Sejauh menyangkut Islam, dampak sistemis peranan berkembang intelektual-intelektual (santri) ialah proses menaik dari Islamisasi lebih lanjut di negeri ini yang kini tampak sesuai dengan momentum nyatanya.

Tidak diragukan bahwa “bekerja dari dalam” dapat menjadi sumber kekecutan hati (*disillusionment*). Keterpesonaan rakyat terhadap pemerintah sudah bukan hal yang asing lagi. Namun, tidak seperti badan usaha swasta yang menghadapi keengganan para pelanggan, hampir semua pemerintah tampak tidak mampu mengoreksi diri. Aparat-aparat birokrasi yang ditempatkan oleh para pemerintah tentu terdorong untuk memelihara *status quo* dan menahan (*sandbag*) upaya-upaya pembaruan apa pun. Dan kekuasaan membuat undang-undang (*legislature*), tampak jelas dari penampilannya, lebih peka terhadap tekanan-tekanan keras dari kelompok-kelompok tertentu ketimbang terhadap kepedulian lebih umum dari masyarakat banyak. Dalam keadaan-keadaan itu, tidaklah mengherankan bila rakyat kian melihat ke cara-cara baru dan tidak konvensional untuk memperbaiki pemerintah. Dengan adanya korupsi yang menjadi-jadi, apa yang dapat dan harus dilakukan oleh rakyat, yang menghendaki suatu pemerintah yang bersih, untuk memperbaiki situasi itu? Suatu jawaban yang memuaskan harus memiliki tiga hal: suatu pengertian yang baik tentang masalah-masalah dasar pemerintah, analisis tentang cara-cara utama mengatasi masalah itu, dan pemfokusan pada cara yang paling memberi harapan.

Kita semua mendengar dan membaca tentang kisah-kisah menakutkan mengenai kemubaziran, korupsi, dan ketidakefisienan pemerintah-pemerintah di negara-negara berkembang. Namun, kasus Indonesia dapat dengan tepat dikatakan sebagai bersifat khusus. Hal ini sebagian karena kompleksitas luar biasa bangsa

ini. Dengan wilayah sekitar dua juta kilometer persegi, terdiri atas 13.667 pulau dengan berbagai ukuran, bentuk dan kepadatan populasi, dan dengan penduduk sekitar 150 juta orang, Indonesia adalah (1) negara kepulauan terbesar, (2) unit politik kesepuluh terbesar di dunia, dan (3) negara kelima terpadat penduduknya. Bahasa Indonesia sangat membantu menjaga keutuhan Republik ini. Namun, dengan adanya aneka ragam kelompok etnis dan orientasi kultur lokal, Indonesia selalu menghadapi masalah-masalah nasional yang sangat kompleks. Dengan demikian, sejauh menyangkut gagasan untuk memiliki suatu pemerintah yang bersih, korupsi menjadi-jadi tampaknya bukanlah masalah pemerintah sendiri, tetapi benturan bersinambungan antar kepentingan-kepentingan khusus dari begitu banyak kelompok sosial, politik, kultural, dan keagamaan, mengingat kepentingan-kepentingan itu menembus setiap program pemerintah, militer dan sipil, dan setiap tingkat pemerintah pusat maupun lokal.

Jadi jelaslah, tidak ada pendekatan-pendekatan sederhana untuk memperbaiki administrasi dan menciptakan suatu pemerintah yang bersih. Tentu, bukanlah masalah mendukung atau menentang pemerintah, sebab sejumlah cukup besar campur tangan pemerintah diperlukan bagi negara sedemikian kompleks seperti Indonesia. Yang dibutuhkan, agaknya, mengidentifikasi perubahan-perubahan sosial sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi harapan rakyat dengan pengorbanan-pengorbanan yang wajar. Salah satu jalan yang baik ialah mengakumulasi pengalaman-pengalaman teknikal dan mengumpulkan informasi melalui aktivitas-aktivitas kerisetan. Tentu hal ini bukanlah suatu pilihan muluk-muluk, bukan pula suatu upaya yang cepat menghasilkan. Namun, dengan mempertimbangkan dimensi waktu investasi apa pun — yang selalu melibatkan prinsip penundaan pemuasan — kerja keras tampaknya perlu. Sebagai ganti mengambil jalan mudah untuk menggalang solidaritas emosional (yang sifatnya selalu memiliki orientasi negatif), sebagian intelektual Muslim (santri) yang baru muncul tampaknya lebih tertarik pada aktivitas pemecahan masalah.

Cara lain yang mungkin dilakukan untuk menciptakan suatu pemerintahan yang bersih ialah memperkuat orientasi-orientasi etika yang berdasarkan agama. Sudah tepatlah bila dikatakan bahwa Indonesia — karena kenyataan bahwa Islam adalah agama mayoritas penduduk Indonesia — diharapkan memanfaatkan sumber ajaran Islam untuk orientasi-orientasi etikanya. Sebagian nilai Islam malah sudah terdapat dalam ideologi nasional, khususnya Pancasila. Namun, kenyataan yang ada ialah bahwa Indonesia adalah negara Muslim yang paling sedikit terislamkan di dunia. Pernyataan yang agak kontradiktif ini tidak seluruhnya tanpa dasar. Jika penggunaan abjad tertentu dapat dijadikan isyarat maka dapat dikatakan bahwa Muslim Indonesia tidak tahu cara menulis bahasa nasional mereka dalam abjad Arab sebagaimana halnya dengan semua bangsa Islam, kecuali Turki (dikarenakan Kemalisme berlebihan) dan Bangladesh (yang memiliki abjad sendiri). Orang-orang Indonesia menggunakan hanya abjad Romawi.

Cara Baru Berpolitik: Sebuah Tuntutan

Dengan demikian proses Islamisasi lebih lanjut negeri ini, sebagaimana tersebut di atas, sangat relevan dengan pembicaraan kita. Namun demikian, bukanlah tidak dapat dielakkan bahwa, bahkan bagi suatu negara Muslim seperti Indonesia, proses lanjut Islamisasi damai diterima dengan hangat. Dalam satu hal, agak disayangkan bahwa orientasi keislaman yang kuat selalu dikaitkan dengan oposisi terhadap pemerintah. Hal ini tidaklah mengherankan, sebab Islam Indonesia, sebagaimana dikemukakan di atas, memainkan suatu peranan konsisten sebagai ideologi (*rallying ideology*) terhadap kolonialisme. Peranan itu menghasilkan kemerdekaan nasional. Karena kaum Muslim mengemukakan gagasan-gagasan politik yang tidak semuanya sebangun dan serupa dengan tuntutan praktis Republik ini, maka tumbuhlah prasangka antara politik yang berorientasi Islam dan pemerintah yang berorientasi nasional.

Dalam meredakan prasangka yang timbul antara pemerintah dan rakyat yang berorientasi keislaman, penting kiranya bila Islam di Indonesia didefinisikan secara lebih inklusivistis. Dengan demikian, simbol-simbol Islam harus terbuka dan mampu dimengerti (*shared*) semua Muslim, di dalam maupun di luar pemerintah. Ini bukanlah suatu dalih untuk melakukan kompromi dan meninggalkan idealisme tinggi Islam. Tapi, masalahnya ialah bahwa harus ada suatu metode baru dakwah, yang menekankan *hikmah* (kebijaksanaan) dan *maw'izhah hasanah* (seruan yang baik), sesuai dengan petunjuk al-Qur'an (Q 16:125), agar semua orang "*mampu mendengar firman Allah,*" (Q 9:6).

Suatu upaya untuk mengakhiri citra eksklusivistis politik yang berorientasi Islam, menuntut sikap konsisten untuk mau mengorbankan hasil-hasil politis jangka pendek. Karena itu, upaya semacam itu harus memfokus pada proses demokratisasi sebagai mekanisme utama untuk mencapai suatu pemerintah yang bersih, terbuka, dan adil. Pada tingkat nasional, metode paling langsung adalah pembentukan suatu koalisi politik yang lebih luas — antara orang-orang yang saling punya perhatian kepada demokrasi — yang menuntut keterbukaan sikap. Tentu saja keterbukaan sikap bukanlah segala-galanya. Persoalan kuncinya ialah bagaimana menciptakan kesalinghormatan di kalangan elite bangsa, dan di kalangan seluruh rakyat, sebab demokrasi adalah mustahil tanpa hal itu.

Melihat kembali pada masa lalu sejarah, gagasan semacam itu bukanlah sama sekali tidak realistis. Modernisasi Islam Indonesia, khususnya sebagaimana dikemukakan oleh Haji Agus Salim, pada dasarnya bercorak inklusivistis. Tidaklah berlebihan bila dinyatakan bahwa awal demokrasi Indonesia — meski berumur pendek — sebagian besarnya adalah kontribusi politisi yang berorientasi Islam dan sekaligus berpendidikan Barat asuhan Salim. Sebagai seorang Bapak intelektualisme Islam Indonesia, "Haji Agus Salim adalah seorang Muslim dengan simpati sosialis, seorang dengan prinsip tinggi yang tidak sudi mengorbankan keyakinan-keyakinannya

untuk kelayakan (*expediency*)”.⁹ Dia termasuk orang yang bertanggung jawab terhadap penanaman semangat demokratis dan sikap terbuka di hati kaum muda Muslim, yang kemudian tampil menganjurkan pikiran liberal dan sosialis Barat, dan mendukung kemajuan, stabilitas, dan toleransi.¹⁰

Dalam analisis terakhir, suatu cara baru berpikir tentang politiklah yang dituntut dari setiap intelektual Muslim Indonesia. Karena sumber bangsa terbatas, maka pemerintah tidak dapat berupaya memenuhi tuntutan setiap kelompok. Terlebih, sumber-sumber itu lebih daripada sekadar bersifat finansial atau ekonomi. Sebagaimana telah ditunjukkan dalam perkembangan bangsa selama empat dasa warsa ini, apa yang dapat dilakukan oleh politik dan pemerintah bersifat terbatas. Satu hal yang kita tahu pasti bahwa apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah atau militer ialah memelihara kesatuan dan keutuhan Republik. Tetapi, perkembangan nasional dalam arti terluas memerlukan lebih dari sekadar kesatuan dan keutuhan bangsa. Ia memerlukan sumber-sumber manusiawi dengan kemampuan organisasional dan manajerial, di sektor privat dan umum, yang selalu saja kurang. Karena masyarakat telah memberi pemerintah banyak tanggung jawab penting, dari menciptakan dan memelihara keamanan nasional sampai menciptakan suatu sistem keadilan, maka penting kiranya bila pemerintah melakukan dengan baik tugas-tugas yang diupayakan untuk dilaksanakannya itu. Tampilnya intelektual-intelektual Muslim (santri) dan orang-orang berpendidikan lainnya akan sangat membantu pemerintah yang bermaksud baik semacam itu. [❖]

⁹ Greta O. Wilson, *Regents, Reformers, and Revolutionaries* (Hawaii: The University Press of Hawaii, 1978), h. 62.

¹⁰ Herbert Feith dan Lance Castle, *Indonesia Political Thinking 1945-1965* (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1970), h. 203.